

# Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang)

Widya Utami

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: [utaiwidya@gmail.com](mailto:utaiwidya@gmail.com)

**Abstract:** *The legislative body, which has the right to formulate and make laws, in Indonesia is the House of Representatives (DPR). Whereas in the United States, the legislative body is the Congress, which consists of the Senate and the House of Representatives. This difference in structure shows that there are many major differences between the structures and functions of the two countries, especially in the area of lawmaking. This difference has an impact on the lawmaking process in each country. This article uses a qualitative method with library research techniques to compare the legislative systems of Indonesia and the United States, especially in the institutional structure and lawmaking process. Data was collected from various literatures such as books, scientific journals, laws and regulations, as well as official documents from the legislative institutions of both countries. This article concludes that the Indonesian Parliament and the United States Congress both have the task of making laws. In Indonesia, bills can be proposed by the government, members of the DPR, or the public. After being discussed and approved by the DPR, the bill is sent to the president for approval. In the United States, the process is more complicated because it involves two institutions: The Senate and the House of Representatives. Both must approve bills before they are submitted to the president. Members of the Indonesian House of Representatives are elected every five years, while members of the US Congress have different terms: senators are elected every six years and members of the House of Representatives every two years. The legislative process in Indonesia is conducted through discussions in committees before being decided in a plenary meeting.*

**Keywords:** *Legislative, Comparison, Indonesia, America*

**Abstrak:** Lembaga legislatif, yang berhak merumuskan dan membuat undang-undang, di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatifnya adalah Kongres, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaan struktur ini menunjukkan ada banyak perbedaan besar antara struktur dan fungsi dari kedua negara, khususnya pada bidang pembuat undang-undang. Perbedaan ini berdampak pada proses pembuatan undang-undang di setiap negara. Artikel ini menggunakan metode kualitatif

dengan teknik studi kepustakaan (library research) untuk membandingkan sistem legislatif Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam struktur kelembagaan dan proses pembentukan undang-undang. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga legislatif kedua negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPR Indonesia dan Kongres Amerika Serikat sama-sama memiliki tugas membuat undang-undang. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa diajukan oleh pemerintah, anggota DPR, atau masyarakat. Setelah dibahas dan disetujui DPR, RUU dikirim ke presiden untuk disahkan. Di Amerika Serikat, prosesnya lebih rumit karena melibatkan dua lembaga: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya harus menyetujui RUU sebelum diajukan ke presiden. Anggota DPR Indonesia dipilih setiap lima tahun, sedangkan anggota Kongres AS memiliki masa jabatan berbeda: senator dipilih setiap enam tahun dan anggota DPR setiap dua tahun. Proses legislasi di Indonesia dilakukan melalui pembahasan di komisi-komisi sebelum diputuskan dalam rapat paripurna.

**Kata kunci:** *Legislatif; Perbandingan; Indonesia; Amerika.*

## Pendahuluan

Negara juga didefinisikan dari perspektif fungsional, yaitu sebagai lembaga yang memberikan perlindungan, keamanan, dan keadilan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Fungsi utama negara adalah memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan keadilan kepada seluruh warga negara, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengatur ekonomi untuk kesejahteraan bersama.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu memiliki lembaga pemerintahan atau negara yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam mengatur masyarakat dan berjalannya sebuah negara.

---

<sup>1</sup> Junaedi Junaedi, and Agus Dimiyati. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01 (2020): 1-9.

<sup>2</sup> Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa, "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80–88, <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.147>.

Indonesia menganut pembagian tiga kamar atau trikameral yang terdiri dari lembaga Eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>3</sup> Lembaga eksekutif di Indonesia adalah presiden dan Wakil presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan administrasi pemerintahan. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Biasanya, lembaga ini terdiri dari dua kamar atau majelis, yaitu majelis rendah (seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) dan majelis tinggi (seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah),<sup>4</sup> meskipun ada juga sistem legislatif dengan satu kamar saja.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah membuat undang-undang. Namun dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang efektif karena beberapa hasil undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih banyak menuai cibiran dari masyarakat. Salah satu undang-undang kontroversi yang terbaru adalah undang-undang tentang Ibu Kota Negara baru Indonesia, yaitu UU nomor 3 tahun 2022. Pembentukan undang-undang tersebut dinilai telah melanggar asas undang-undang yaitu asas keterbukaan, karena dalam proses legislasi revisinya berlangsung singkat.<sup>5</sup> Terkait hal tersebut seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat tidak menutup diri dan bungkam. Karena dengan proses yang singkat dalam pembaharuan undang-undang tersebut menimbulkan spekulasi yang negatif dari masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>6</sup>

Di Amerika Serikat, lembaga legislatif terdiri dari dua kamar, yaitu House of Representatives dan Senat, yang bersama-sama membentuk Kongres. Anggota House of Representatives mewakili wilayah pemilihan tertentu, sedangkan anggota Senat mewakili masing-masing negara bagian. Kedua lembaga ini juga merupakan representasi dari partai politik. Selain itu, Senat memiliki kewenangan untuk

---

<sup>3</sup> Ola Anisa Ayutama, and Amanda Shifatul Jannah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/puux/2012 Terhadap Proses Pembentukan Undang-undang Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 3: 171-186.

<sup>4</sup> Pirmansyah, Miki. "Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem bikameral di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014).

<sup>5</sup> Nor Fadillah. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 243-264.

<sup>6</sup> Ady Thea DA, "No TPSHK:UU IKN Bentuk Kesewenang-Wenangan Kuasa Legislasi Pemerintah-DPRitle," hukum online, 2023.

menolak keputusan yang dibuat oleh House of Representatives, sebuah hak yang tidak dimiliki oleh DPD di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan. Dari segi jumlah kamar, Indonesia dan Amerika sama-sama menganut dua kamar. Namun perbedaan mendasar dari dua lembaga legislatif Indonesia dan Amerika adalah sistem veto yang dianut oleh Amerika.

Kewenangan lembaga legislatif, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pembentukan hukum dan pengawasan terhadap pemerintahan. Kewenangan lembaga legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat mencakup berbagai aspek penting dalam pembentukan hukum, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Meskipun ada perbedaan dalam struktur dan mekanisme kerja antara kedua lembaga legislatif tersebut, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mewakili kepentingan masyarakat, dan menjamin prinsip-prinsip demokrasi.

Berbagai penelitian telah membandingkan sistem legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dari segi struktur, kewenangan, dan prosedur pembentukan undang-undang. Purnama et al.<sup>8</sup> menjelaskan bahwa kedua negara menganut sistem bikameral, namun memiliki perbedaan dalam struktur dan kewenangan masing-masing kamar legislatif; di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD yang membentuk MPR, sedangkan di Amerika Serikat terdiri dari House of Representatives dan Senat yang membentuk Kongres. Prima<sup>9</sup> menyoroti bahwa kewenangan legislasi di Indonesia didominasi DPR yang bekerja bersama Presiden, sementara DPD hanya berperan memberikan pertimbangan, berbeda dengan Senat di AS yang memiliki kedudukan seimbang dengan House dan dapat menggunakan hak veto.

---

<sup>7</sup> Dewandaru, R. Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-25.

<sup>8</sup> Purnama, Nurlita, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa. "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80-88.

<sup>9</sup> Prima, Jaka. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019).

Ramadhan dan Purnama<sup>10</sup> menambahkan bahwa dalam proses legislasi, presiden AS memiliki hak veto terhadap RUU, sedangkan presiden Indonesia tidak, dan perbedaan juga terlihat dalam pengajuan RUU yang di Indonesia dapat atas nama Presiden, sementara di AS menjadi milik lembaga legislatif setelah diajukan. Partiah<sup>11</sup> menekankan perbedaan sistem bikameral yang dianut, yakni strong bicameral di Amerika dan soft bicameral di Indonesia, yang memengaruhi kekuatan lembaga legislatifnya. Putra et al.<sup>12</sup> menegaskan bahwa fungsi legislasi di Indonesia bersifat *joint function* antara DPR dan Presiden, sedangkan di Amerika Serikat kekuasaan membuat undang-undang berada sepenuhnya di tangan Kongres, dengan kedua kamar yang memiliki kekuasaan setara. Dengan demikian, meskipun secara struktural tampak serupa, sistem legislatif kedua negara memiliki perbedaan mendasar dalam hal kekuasaan, mekanisme kerja, dan hubungan antar lembaga.

Artikel ini membahas tentang Bagaimana bentuk kewenangan badan legislatif Negara Indonesia dengan Amerika; Bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang pada Negara Indonesia dengan Amerika; artikel ini bertujuan untuk membandingkan terkait persamaan dan perbedaan kewenangan Lembaga Legislatif dalam proses pembuatan undang-undang antara Negara Indonesia dengan Amerika.

Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk membandingkan sistem legislatif Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam hal struktur kelembagaan dan proses pembentukan undang-undang. Data diperoleh melalui telaah berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lembaga legislatif kedua negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengungkap persamaan dan perbedaan antara DPR dan DPD di Indonesia dengan House of

---

<sup>10</sup> Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 2 (2017): 92-104.

<sup>11</sup> Partiah, Siti. "Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat." *As-Shabifab: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 148-164.

<sup>12</sup> Putra, LM Ricard Zeldi, Gamlan Dagani, Samsir Andi, and Ronal Pratama Putra. "Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12316-12325.

Representatives dan Senate di Amerika Serikat, termasuk dalam hal representasi politik dan kewenangan legislatif masing-masing lembaga.

### **Pengertian, Peran, Fungsi Lembaga Legislatif Negara**

Negara merupakan salah satu entitas politik yang menjadi pondasi bagi organisasi sosial manusia. Pengertian negara tidaklah statis karena telah mengalami evolusi dan perubahan sepanjang sejarah manusia. Namun, pada intinya, negara adalah suatu wilayah geografis yang memiliki batas-batas tertentu, di mana pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Pengertian ini mencakup aspek geografis, politik, sosial, dan ekonomi.<sup>13</sup>

Sebagai entitas politik, negara memiliki beberapa unsur penting, di antaranya adalah wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan.<sup>14</sup> Wilayah negara merupakan area geografis yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu pemerintahan. Penduduk merupakan individu yang tinggal di wilayah tersebut dan tunduk pada hukum dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan negara serta kepentingan masyarakat di dalamnya.<sup>15</sup> Sedangkan kedaulatan adalah hak negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Lembaga negara merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan suatu negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi penting dalam menjalankan urusan publik, mengatur kehidupan masyarakat, dan memastikan terwujudnya tujuan-tujuan negara. Lembaga negara biasanya terdiri dari cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga lainnya yang mendukung dan melengkapi kinerja pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi peran, fungsi, dan pentingnya lembaga negara dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan efektivitas pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Setiyono, Budi. *Pengantar Ilmu Politik*. Bumi Aksara, 2024.

<sup>14</sup> Fathur, Arieffudin, Ifan Fayiz Al Farizqi, and Robby Abdul Kholik. "NEGARA DAN WARGA NEGARA." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 325-330.

<sup>15</sup> Erwiningsih, Winahyu. "Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2009.

Berikut ini adalah peran negara:

1. Pembentukan Kebijakan

Lembaga negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.<sup>16</sup> Ini termasuk pengambilan keputusan mengenai anggaran, kebijakan fiskal, program-program sosial, dan regulasi-regulasi yang mengatur berbagai sektor.

2. Pengawasan Terhadap Pemerintah

Salah satu fungsi utama lembaga negara adalah pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.<sup>17</sup> Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokratis, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Pelaksanaan Hukum

Lembaga negara, terutama lembaga yudikatif, memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>18</sup> Mereka bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang, menyelartikelkan perselisihan hukum, dan memberikan keputusan yang adil dalam kasus-kasus pidana, perdata, maupun konstitusi.

4. Representasi Kepentingan Rakyat

Lembaga negara, terutama lembaga legislatif, bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan

---

<sup>16</sup> Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. "Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat." *Sovereignty* 2, no. 4 (2023): 354-368.

<sup>17</sup> Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23-35.

<sup>18</sup> Nurambiya, Muhammad Abdul Aziz, and Demson Tiopan. "Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5202-5214.

keputusan.<sup>19</sup> Anggota lembaga legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya di tingkat pemerintahan.

#### 5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan tidak menjadi korban diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Fungsi-Fungsi Lembaga Negara yang terdiri dari:

##### 1. Eksekutif

Lembaga eksekutif, yang umumnya dipimpin oleh presiden atau kepala pemerintahan, memiliki fungsi utama dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, mengelola administrasi publik, dan mewakili negara di tingkat nasional maupun internasional.<sup>20</sup> Beberapa fungsi utama dari lembaga eksekutif yaitu:

##### ▪ Pelaksanaan Kebijakan Publik

Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. Mereka mengelola berbagai program pemerintah, memimpin birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

##### ▪ Pembuatan Keputusan Strategis

Lembaga eksekutif membuat keputusan strategis terkait dengan keamanan nasional, politik luar negeri, ekonomi, dan berbagai aspek penting lainnya. Presiden atau kepala pemerintahan

---

<sup>19</sup> Arifin, Muhammad Zainul, and Yunial Laily Mutiari. "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2017): 1-15.

<sup>20</sup> Zuhro, R. Siti. "Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1-41.



berperan dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap arah dan kebijakan negara.

- **Penyampaian Kebijakan dan Program**

Lembaga eksekutif memiliki fungsi untuk menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup komunikasi dengan publik, pembenaran kebijakan, dan mempromosikan program-program pemerintah kepada pemangku kepentingan.

## 2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau Kongres, bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah.<sup>21</sup> Beberapa fungsi utama dari lembaga legislatif meliputi:

- **Pembentukan Undang-Undang:** Lembaga legislatif membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan menetapkan kerangka kerja untuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara.

- **Pengawasan Terhadap Pemerintah:** Lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta pelaksanaan kebijakan. Mereka melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti dengar pendapat, interpelasi, dan penyelidikan.

- **Penganggaran:** Lembaga legislatif menetapkan anggaran negara melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Mereka mengevaluasi rencana pengeluaran pemerintah dan memutuskan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan.

## 3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif, yang terdiri dari sistem pengadilan, bertanggung jawab atas penegakan hukum, menegakkan

---

<sup>21</sup> Sapri, Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak. "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1437-1451.

keadilan, dan menyelartikelkan sengketa hukum antara individu, antara individu dan pemerintah, serta antara pemerintah dengan pihak lain.<sup>22</sup> Beberapa fungsi utama dari lembaga yudikatif meliputi:

- Penegakan Hukum: Lembaga yudikatif menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua individu dan entitas di bawah yurisdiksinya mematuhi hukum yang berlaku.
- Penyelartikelan Sengketa: Lembaga yudikatif bertanggung jawab atas menyelartikelkan sengketa hukum melalui proses peradilan yang adil dan objektif.
- Interpretasi Hukum: Lembaga yudikatif juga memiliki fungsi untuk menginterpretasikan undang-undang dan konstitusi, menentukan makna dan ruang lingkupnya, serta mengambil keputusan tentang kesesuaian hukum dengan konstitusi.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keamanan hukum. Oleh karena itu, penting bagi ketiga lembaga ini untuk bekerja secara independen namun harmonis dalam mencapai tujuan-tujuan mereka untuk kepentingan bersama masyarakat.

#### 4. Konstitusional

Lembaga konstitusional bertanggung jawab untuk menjamin pematuhan terhadap konstitusi negara. Mereka memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, termasuk pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme checks and balances.

#### 5. Audit dan Pengawasan

Lembaga audit dan pengawasan memiliki peran dalam memeriksa pengelolaan keuangan publik dan kinerja lembaga pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya

---

<sup>22</sup> Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

publik, serta untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan atau pemborosan.

a. Pentingnya Lembaga Negara

Lembaga negara memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan efektivitas pemerintahan. Mereka membentuk kerangka kerja institusional yang diperlukan untuk menjalankan urusan publik, mengatur kehidupan masyarakat, dan menyelartikelkan konflik serta perselisihan secara adil dan transparan. Tanpa lembaga negara yang kuat dan berfungsi dengan baik, risiko terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat meningkat.

Lembaga negara adalah pondasi dari sistem pemerintahan suatu negara yang demokratis dan berdaulat. Mereka memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjalankan urusan publik, mengatur kehidupan masyarakat, dan memastikan terwujudnya tujuan-tujuan negara. Dengan menjaga keseimbangan kekuasaan, menghormati prinsip-prinsip demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia, lembaga negara memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

## **Lembaga Legislatif di Indonesia dan Amerika**

Lembaga legislatif adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan suatu negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Dalam pengertian yang lebih mendalam, lembaga legislatif mencakup struktur, fungsi, dan peran yang dimiliki oleh badan legislatif dalam suatu negara. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam pengertian lembaga legislatif, termasuk aspek-aspek pentingnya, peran dalam sistem pemerintahan, dan hubungannya dengan masyarakat. Lembaga legislatif merupakan badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Lembaga legislatif berperan dalam menetapkan kebijakan

---

<sup>23</sup> R. Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.

publik, mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas. Secara umum, lembaga legislatif bertindak sebagai forum bagi wakil-wakil rakyat untuk berdebat, membuat keputusan, dan menghasilkan produk legislatif yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara.

Struktur lembaga legislatif bervariasi antara negara-negara, tetapi umumnya terdiri dari satu atau dua badan legislatif.<sup>24</sup> Badan legislatif tunggal biasanya terdiri dari satu kamar yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pembuatan undang-undang. Contoh negara dengan badan legislatif tunggal adalah Indonesia, yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, badan legislatif ganda terdiri dari dua kamar atau majelis yang memiliki peran yang berbeda dalam proses legislatif. Contoh negara dengan badan legislatif ganda adalah Amerika Serikat, yang memiliki Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuk Kongres.

Lembaga legislatif juga memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Sebagai wakil dari rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat. Hubungan yang baik antara lembaga legislatif dan masyarakat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam proses politik. Meskipun memiliki peran yang penting dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut termasuk kurangnya sumber daya, polarisasi politik, korupsi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja legislatif. Namun, dengan tantangan tersebut juga datang peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga legislatif, termasuk dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Secara keseluruhan, lembaga legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan suatu negara yang memiliki peran yang penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Dengan struktur, fungsi, dan peran yang berbeda-beda, lembaga legislatif

---

<sup>24</sup> Andriyan, Dody Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 79-94.

menjadi forum bagi perdebatan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara.<sup>25</sup> Penting untuk memahami peran dan tanggung jawab lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan, serta hubungannya dengan masyarakat dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akunt

## **Kewenangan Lembaga Legislatif di Indonesia dan Amerika**

Kewenangan legislatif merujuk pada kekuasaan yang diberikan kepada lembaga legislatif suatu negara untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Lembaga legislatif, biasanya disebut sebagai parlemen atau kongres, adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan yang ada dalam sistem demokratis modern, bersama dengan eksekutif dan yudikatif. Kewenangan legislatif adalah inti dari sistem demokrasi representatif, yang mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik melalui wakil yang mereka pilih.<sup>26</sup>

Di dalam kewenangan legislatif, terdapat beberapa fungsi utama yang menjadi tanggung jawab lembaga legislatif. Pertama, mereka memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang baru. Ini bisa melibatkan memperkenalkan undang-undang baru untuk menanggapi kebutuhan atau masalah baru dalam masyarakat, serta merevisi atau mencabut undang-undang yang sudah ada yang dianggap tidak lagi relevan atau efektif. Proses pembuatan undang-undang melibatkan diskusi, debat, dan pemungutan suara di antara anggota legislatif. Selain membuat undang-undang, lembaga legislatif juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintahan. Ini mencakup memeriksa dan menyetujui kebijakan dan program pemerintah, mengawasi pengeluaran anggaran negara, serta melakukan penyelidikan terhadap tindakan pemerintah yang dicurigai tidak sesuai dengan hukum atau tidak efisien. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Selain itu, lembaga

---

<sup>25</sup> Sari, Lusi Puspika, Aidil Zetra, and Tengku Rika Valentina. "Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Nagari Talang Anau." *Jurnal Niara* 13, no. 2 (2021): 11-22.

<sup>26</sup> Bakry, Kasman, Apriyanto Apriyanto, and Efraim Mangaluk. *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

legislatif juga memiliki peran dalam mengontrol kekuasaan eksekutif. Mereka dapat menyetujui atau menolak nominasi pejabat pemerintah yang diajukan oleh eksekutif, serta mengawasi kebijakan dan tindakan eksekutif melalui pertanyaan, laporan, dan penyelidikan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang umumnya diatur dalam konstitusi suatu negara, dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kemerdekaan lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>27</sup>

Selain fungsi-fungsi utama tersebut, lembaga legislatif juga dapat memiliki kewenangan tambahan berdasarkan konstitusi atau peraturan internal mereka sendiri. Misalnya, beberapa parlemen memiliki kekuasaan untuk menetapkan pajak dan anggaran negara, sementara yang lain dapat memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian internasional. Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki peran dalam menyeimbangkan kepentingan daerah atau wilayah yang berbeda dalam negara tersebut. Pentingnya kewenangan legislatif dalam suatu sistem pemerintahan tidak dapat diabaikan. Lembaga legislatif adalah representasi dari suara rakyat dan berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan proses legislatif yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan legislatif digunakan untuk kepentingan publik dan untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan.

Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara yang menggunakan sistem politik trias. Struktur kekuasaan ini mencakup cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Departemen Keamanan Masyarakat (DPR), Kementerian Kesehatan Masyarakat (MPR), dan Departemen Kesehatan Daerah adalah badan legislatif negara bagian. Presiden dan Penasihat Presiden terdiri dari Dewan Legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang.

---

<sup>27</sup> Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

Namun, panitia pengadilan (MK dan KY) bertanggung jawab atas masalah hukum.<sup>28</sup>.

Dalam struktur pemerintahan negara, lembaga legislatif adalah lembaga tertinggi. Cabang kekuasaan legislatif pertama-tama mewakili kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara dimulai dengan tujuan mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, parlemen, lembaga legislatif, atau lembaga perwakilan rakyat harus diberi otoritas untuk menetapkan peraturan tersebut. Tiga tugas utama yang harus diselartikelkan oleh para wakil rakyat di parlemen adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan rakyat
2. Peraturan yang dapat membebani kekayaan rakyat
3. Peraturan tentang pengeluaran penyelenggara negara.

Pengaturan ketiga hanya dapat dibuat dengan persetujuan langsung dari warga negara, yang diwakili oleh para wakil mereka di parlemen, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Fungsi pengaturan ini adalah untuk memberikan otoritas untuk menetapkan peraturan yang mengikat warga negara dengan peraturan yang membatasi. Dengan demikian, otoritas ini hanya dapat digunakan jika rakyat setuju untuk mengikuti peraturan tersebut, karena cabang kekuasaan yang dianggap memiliki otoritas mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, dengan persetujuan eksekutif dan parlemen, undang-undang dasar yang paling tinggi harus dibuat dan ditetapkan.

Fungsi legislasi merujuk pada peran dan tanggung jawab lembaga legislatif dalam proses pembuatan undang-undang serta pengawasan pemerintahan. Fungsi legislasi sangat penting dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana lembaga legislatif bertindak sebagai wakil rakyat dan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang lembaga legislatif di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan

---

<sup>28</sup> Wahyu Eko Nugroho, "Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Gema Keadilan*, 2014, <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3732>.

bagi fungsi, struktur, dan tugas-tugas lembaga-lembaga legislatif tersebut.. Dalam praktik Indonesia, tugas legislatif dianggap sebagai tugas kedua dan ketiga. Meskipun demikian, ketiga-tiganya sama pentingnya. Di seluruh dunia, fungsi pengawasan dianggap masih lebih penting dibandingkan fungsi legislatif. Produk hukum baru yang sangat dicari. Namun, pada akhirnya, common law malah lebih suka membuat peraturan tertulis.<sup>29</sup>

Badan legislatif Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Kongres, adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan federal negara ini. Kongres terdiri dari dua badan, yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berdirinya, Kongres telah memainkan peran kunci dalam membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sejarah, struktur, fungsi, dan peran Kongres Amerika Serikat dalam sistem politiknya. Kongres AS adalah cabang legislatif pemerintahan federal AS. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat membentuk sistem yang dianut, yang terdiri dari dua kamar atau bikameral. Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing dari mereka mewakili distrik, dan jabat selama dua tahun. Jumlah kursi dibagi berdasarkan populasi negara bagian, tetapi setiap negara bagian memiliki dua senator di Senat, terlepas dari jumlah penduduknya. Senator terdiri dari seratus anggota dan menjabat selama enam tahun. Anggota DPR dan senator dipilih secara langsung oleh masyarakat; namun, di beberapa negara bagian, gubernur dapat memilih pengganti sementara untuk posisi Senat yang kosong.

Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan memiliki wewenang yang sama untuk membuat undang-undang. DPR dapat membuat rancangan tersebut menjadi undang-undang karena House of Representative tidak dapat mengundangkannya. Hanya House of Representative yang dapat membuat RUU sebelum diajukan ke Senat. DPR juga memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh House of Representative, seperti memilih anggota lembaga tinggi negara atau pimpinan lembaga tinggi negara seperti hakim agung, pimpinan polisi, dan anggota BPK. Di Amerika Serikat, Senat memiliki otoritas ini. Presiden dapat mempertimbangkan untuk memulai perang dengan negara lain. Kongres Amerika memiliki otoritas untuk

---

<sup>29</sup> S Sugiman, "Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen UUD Nkri 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020.



membahas dan menyetujui RUU anggaran negara dan menetapkan perang. Selain itu, DPR Amerika dapat mengajukan impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan dapat mengajukan impeachment, namun tidak hanya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga terhadap pejabat federal lainnya.

Salah satu tugas Senat adalah menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang diajukan oleh House of Representative dan pemerintah. Namun, Senat hanya dapat memeriksa dan membahas RUU yang diajukan oleh House of Representative, tetapi tidak dapat membuat atau mengusulkan RUU. DPD tidak memiliki peran yang signifikan sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di luar kepentingan nasional. Selain itu, sebagai lembaga negara, mereka tidak dapat mengambil keputusan dan hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi lembaga legislatif. Selain itu, DPD dibatasi pada masalah otonomi daerah. Senat Amerika Serikat memiliki kekuasaan asli untuk mempertimbangkan dan menyetujui perjanjian internasional, serta memilih menteri, hakim federal, konsul, duta, dan pejabat lainnya.<sup>30</sup>

Perbandingan kewenangan antara lembaga legislatif di Indonesia (DPR) dan Amerika Serikat (Kongres) mencakup beberapa perbedaan signifikan dalam struktur, proses pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan representasi kepentingan rakyat. Meskipun keduanya memiliki peran yang serupa dalam sistem pemerintahan, perbedaan-perbedaan ini mencerminkan konteks politik, sejarah, dan budaya dari masing-masing negara. Berikut adalah perbandingan kewenangan antara DPR dan Kongres:

#### Pembentukan Undang-Undang:

##### 1. Indonesia (DPR)

- DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang.
- Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang dapat

---

<sup>30</sup> Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdihar Chairunnisa, "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80–88, <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.147>

diajukan oleh pemerintah, anggota DPR, atau bahkan masyarakat umum.

- Setelah disetujui oleh DPR, RUU kemudian diajukan kepada presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

## 2. Amerika Serikat (Kongres)

- Kongres memiliki kewenangan untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang di Amerika Serikat.
- Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang atau bill, yang kemudian dibahas di komite-komite dan lantai badan legislatif sebelum disahkan menjadi undang-undang.
- Setelah disetujui oleh Kongres, undang-undang kemudian diajukan kepada presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang atau veto.

Pengawasan Terhadap Pemerintah:

## 1. Indonesia (DPR)

- DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah.
- Mekanisme pengawasan meliputi interpelasi, angket, hak angket, dengar pendapat, dan penyelidikan.
- DPR juga dapat memberikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah jika dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

## 2. Amerika Serikat (Kongres)

- Kongres memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah, termasuk lembaga eksekutif.
- Pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengar pendapat, penyelidikan, dan persetujuan terhadap berbagai kebijakan dan program.
- Kongres juga memiliki otoritas untuk melakukan impeachment terhadap pejabat tinggi, termasuk presiden, jika dianggap melanggar hukum atau melakukan tindakan yang tidak pantas.

Representasi Kepentingan Rakyat

### 1. Indonesia (DPR)

- DPR bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembentukan kebijakan.
- Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.

### 2. Amerika Serikat (Kongres)

- Kongres juga bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat di tingkat federal.
- Anggota Kongres dipilih oleh warga negara Amerika Serikat melalui pemilihan umum dan diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.

#### Peran dalam Sistem Pemerintahan

### 1. Indonesia (DPR)

- DPR merupakan bagian dari sistem pemerintahan presidensial.
- DPR memiliki peran penting dalam mengesahkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.

### 2. Amerika Serikat (Kongres)

- Kongres juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan presidensial.
- Kongres memiliki peran penting dalam merumuskan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyeimbangkan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

Meskipun DPR dan Kongres memiliki kewenangan yang sama dalam beberapa aspek penting seperti pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah, ada perbedaan signifikan dalam detailnya. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan sistem pemerintahan yang berbeda antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta memperhatikan keunikan dan kebutuhan dari masing-masing negara.

## **Mekanisme Perubahan Undang-Undang di Indonesia dan Amerika**

Undang-undang (UU) adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif suatu negara yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta menetapkan aturan dan tata cara di berbagai bidang kehidupan. UU biasanya merupakan produk dari proses legislasi yang melibatkan pembahasan, pengesahan, dan penegakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang.<sup>31</sup>

Pengertian undang-undang dapat dipahami dari beberapa sudut pandang:

### **1. Normatif**

Secara normatif, undang-undang adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti bahwa setiap individu atau entitas yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Pelanggaran terhadap undang-undang dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda, hukuman pidana, atau tindakan perdata.

### **2. Fungsional**

Dari segi fungsional, undang-undang berperan sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur, adil, dan teratur. Undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hak dan kewajiban warga negara, prosedur hukum, kebijakan ekonomi, perlindungan lingkungan, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Dengan adanya undang-undang, masyarakat dapat mengatur hubungan mereka dengan pemerintah dan satu sama lain dengan cara yang dianggap adil dan beradab.

### **3. Prosesual**

Dari sudut pandang prosesual, undang-undang adalah hasil dari proses legislasi yang melibatkan pembuatan, pembahasan, dan pengesahan oleh badan legislatif. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahapan, seperti penyusunan rancangan undang-undang (RUU), pembahasan di komite-

---

<sup>31</sup> Wikipedia, "Undang-Undang (Indonesia)," n.d.

komite, pemungutan suara di sidang paripurna, dan penandatanganan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan.

#### 4. Sumber Hukum

Undang-undang juga merupakan salah satu sumber utama hukum dalam suatu negara, bersama dengan konstitusi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebiasaan hukum. Undang-undang memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintah, perlindungan hak-hak individu, dan penyelartikelan sengketa.

#### 5. Dinamis

Perlu diingat bahwa undang-undang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan undang-undang sering kali diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat, ekonomi, dan politik, serta untuk memperbaiki kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam peraturan yang sudah ada. Proses perubahan undang-undang dapat melibatkan amendemen atau revisi terhadap undang-undang yang ada, atau pembuatan undang-undang baru untuk mengatasi isu-isu yang baru muncul.

Dengan demikian, undang-undang merupakan fondasi dari sistem hukum suatu negara, yang memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan bagi terciptanya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mekanisme perubahan undang-undang (UU) merupakan proses yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara untuk mengubah, menambah, atau mencabut undang-undang yang telah ada. Mekanisme ini penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Di setiap negara, mekanisme perubahan UU dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan pemerintahannya.

Urgensi perubahan undang-undang, Perubahan undang-undang adalah suatu kebutuhan yang penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa urgensi perubahan undang-undang:

##### 1. Penyesuaian dengan Perubahan Sosial

Masyarakat terus mengalami perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan tuntutan. Undang-undang yang sudah ada mungkin tidak lagi sesuai atau relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, perubahan undang-undang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

2. Respons terhadap Perkembangan Ekonomi

Perubahan undang-undang juga diperlukan sebagai respons terhadap perubahan dalam sektor ekonomi. Perkembangan teknologi, perdagangan internasional, dan model bisnis baru seringkali memerlukan adanya regulasi baru atau penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum memberikan kerangka kerja yang sesuai bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perubahan undang-undang dapat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan memperbarui undang-undang atau menambahkan peraturan baru, negara dapat memastikan bahwa hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi dijamin dan diberlakukan secara efektif.

4. Penanggulangan Tantangan Global

Tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan perdagangan internasional memerlukan respon yang serius dari berbagai negara. Perubahan undang-undang yang diselaraskan dengan standar internasional atau menanggapi isu-isu global ini diperlukan untuk memastikan bahwa negara dapat berperan aktif dalam menanggulangi masalah-masalah tersebut.

5. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Perubahan undang-undang juga dapat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Hal ini bisa meliputi penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, atau peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan melakukan

perubahan yang tepat, negara dapat memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

#### 6. Mengatasi Ketidakseimbangan atau Ketimpangan

Perubahan undang-undang juga dapat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup pemberlakuan regulasi baru untuk melindungi kelompok rentan, mengatasi disparitas ekonomi, atau memperbaiki akses terhadap layanan publik. Dengan mengubah undang-undang, negara dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam rangka memastikan keberlangsungan dan keadilan hukum, perubahan undang-undang merupakan suatu keharusan. Proses ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperhatikan urgensi perubahan undang-undang sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah mekanisme perubahan undang-undang di Negara Indonesia dan Amerika:

#### 1. Indonesia

Proses perubahan undang-undang adalah bagian integral dari perkembangan sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, proses perubahan undang-undang disebut sebagai amandemen. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi mekanisme perubahan undang-undang di Indonesia, termasuk dasar hukumnya, prosesnya, dan dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Dasar hukum untuk proses perubahan undang-undang di Indonesia tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pembentukan undang-undang, termasuk proses amandemen. Proses perubahan undang-undang juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### 1. Inisiatif

Proses perubahan undang-undang di Indonesia dapat dimulai dari berbagai pihak. Inisiatif perubahan undang-undang dapat berasal dari Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), atau bahkan masyarakat umum melalui DPR. Presiden dapat mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR, sementara anggota DPR dapat mengajukan RUU melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

## 2. Pembahasan dan Persetujuan

Setelah RUU diajukan, proses pembahasan dimulai di DPR. RUU tersebut akan dibahas oleh komisi-komisi yang relevan untuk mendapatkan masukan dan melakukan revisi jika diperlukan. Selanjutnya, RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan lebih lanjut dan disetujui dalam tiga bacaan. Persetujuan mayoritas suara anggota DPR diperlukan untuk melanjutkan proses.

## 3. Persetujuan Presiden

Setelah disetujui oleh DPR, RUU tersebut kemudian dikirimkan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Presiden memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut. Jika Presiden menyetujui RUU, maka RUU tersebut menjadi undang-undang dan diterapkan di seluruh Indonesia.

## 4. Uji Materiilitas

Setelah menjadi undang-undang, RUU dapat diuji materiilitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa RUU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Uji materiilitas bertujuan untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan hukum RUU tersebut.

Proses perubahan undang-undang di Indonesia adalah bagian yang penting dari perkembangan sistem hukum dan pemerintahan negara ini. Dengan dasar hukum yang kuat dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, proses ini mencerminkan prinsip demokrasi dan kebutuhan akan adaptasi terhadap perubahan zaman. Meskipun dihadapi oleh sejumlah tantangan, proses perubahan undang-undang



terus menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem hukum dan mewujudkan keadilan di Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Amerika

Proses perubahan undang-undang di Amerika Serikat adalah fondasi dari sistem legislatif negara itu. Mekanisme ini memastikan bahwa undang-undang negara berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pemerintah. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam mekanisme perubahan undang-undang di Amerika Serikat, termasuk prosesnya, peran Kongres dan Presiden, serta tantangan dan dampaknya.

Mekanisme perubahan undang-undang di Amerika Serikat didasarkan pada Konstitusi negara tersebut. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana undang-undang dibuat, diubah, dan diberlakukan di seluruh negeri. Konstitusi memberikan wewenang kepada Kongres untuk membuat undang-undang federal dan kepada Presiden untuk menandatangani menjadi hukum.

### a. Proses Perubahan Undang-Undang di Kongres:

#### 1. Pembentukan Rancangan Undang-Undang (Bill)

Proses perubahan undang-undang dimulai dengan pembentukan rancangan undang-undang, yang disebut sebagai bill. Bill dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk anggota Kongres, komite-komite kongres, atau bahkan dari Presiden sendiri melalui inisiatif eksekutif. Ide untuk sebuah undang-undang dapat muncul dari kebutuhan masyarakat, peristiwa politik, atau masalah yang muncul di masyarakat.

#### 2. Pembahasan di Komite

Setelah bill diajukan, biasanya bill tersebut dirujuk ke komite yang relevan di kedua badan Kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di komite, bill tersebut dipelajari secara mendalam, didiskusikan, dan direvisi jika perlu. Komite juga memiliki kekuasaan untuk mengadakan pendengaran

---

<sup>32</sup> S H Diana Septaviana, S H Sukardi, and S H Rosa Ristawati, *TESIS (4697)-Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Partisipasi Masyarakat* (all.fh.unair.ac.id, 2024).

publik untuk mendengarkan masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan yang terkait dengan bill tersebut.

### 3. Pemungutan Suara di Badan Legislatif

Setelah pembahasan di komite, bill tersebut dibawa ke lantai badan legislatif, yaitu Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat, untuk pemungutan suara. Anggota Kongres memiliki kesempatan untuk membahas bill tersebut dan memberikan amendemen atau perubahan yang diinginkan sebelum pemungutan suara. Jika mayoritas anggota yang hadir setuju dengan bill tersebut, bill tersebut akan lolos ke tahap selanjutnya.

### 4. Konferensi dan Persetujuan Versi Final

Jika bill tersebut telah disetujui oleh kedua badan legislatif, namun terdapat perbedaan antara versi yang disetujui oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, biasanya dilakukan konferensi untuk merundingkan perbedaan tersebut. Hasilnya adalah versi final dari bill yang kemudian disetujui oleh kedua badan legislatif.

### 5. Penandatanganan oleh Presiden

Setelah bill disetujui oleh Kongres, bill tersebut dikirimkan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Presiden memiliki beberapa opsi: ia dapat menandatangani menjadi undang-undang, memveto bill tersebut, atau tidak melakukan apa pun selama 10 hari jika Kongres masih dalam sesi. Jika Presiden memveto bill, Kongres dapat mencoba menolak veto tersebut dengan mayoritas dua pertiga di kedua badan legislatif.

#### b. Mekanisme Perubahan Undang-Undang di Tingkat Presiden

Presiden memiliki peran yang penting dalam proses perubahan undang-undang di Amerika Serikat. Selain dapat mengajukan inisiatif undang-undang, Presiden juga memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh Kongres. Veto Presiden dapat diatasi oleh Kongres hanya dengan mendapatkan mayoritas dua pertiga di kedua badan legislatif.

#### c. Tantangan dalam Proses Perubahan Undang-Undang

Meskipun mekanisme perubahan undang-undang di Amerika Serikat terencana dengan baik, prosesnya sering kali

dihadapi oleh sejumlah tantangan yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan kemajuan undang-undang tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Partisanism

Persaingan politik antara partai-partai politik sering kali menghambat kemajuan undang-undang di Kongres. Ketika anggota Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan karena pertimbangan partai, proses perubahan undang-undang dapat terhambat.

2. Lobi Kepentingan

Kepentingan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, seperti korporasi atau organisasi masyarakat sipil, dapat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang dengan melakukan lobi kepada anggota Kongres atau bahkan Presiden.

3. Gridlock

Ketika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan dalam proses pembentukan undang-undang, hal ini dapat menghasilkan gridlock, di mana tidak ada kemajuan yang dibuat dan undang-undang tidak dapat disahkan.

- d. Dampak Proses Perubahan Undang-Undang

Proses perubahan undang-undang di Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di negara itu. Beberapa dampaknya antara lain:

1. Keseimbangan Kekuasaan

Proses perubahan undang-undang memastikan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Amerika Serikat.

2. Pembaharuan Hukum

Proses perubahan undang-undang memungkinkan hukum untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

3. Keadilan dan Kesejahteraan

Undang-undang yang diperbaharui dan disesuaikan dapat meningkatkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### e. Peningkatan Efisiensi

Dengan meningkatkan undang-undang yang sudah ada atau menciptakan undang-undang baru, proses perubahan undang-undang dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Proses perubahan undang-undang di Amerika Serikat adalah inti dari sistem legislatif negara tersebut. Dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur, proses ini memastikan bahwa undang-undang negara berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan. Meskipun dihadapi oleh sejumlah tantangan, mekanisme perubahan undang-undang di Amerika Serikat tetap menjadi landasan yang penting bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan efektif.

### Penutup

Perbandingan antara lembaga legislatif Amerika Serikat (Kongres) dan Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam struktur, fungsi, sistem pemilihan, dan peran dalam sistem pemerintahan masing-masing negara. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewakili suara rakyat, menghasilkan undang-undang yang berkualitas, dan mengawasi pemerintah, perbedaan-perbedaan ini mencerminkan konteks politik, sejarah, dan budaya dari masing-masing negara. Dalam kesimpulan ini, kita akan mengevaluasi perbandingan tersebut dan mengidentifikasi implikasi pentingnya dalam konteks pemerintahan dan politik kedua negara.

Dalam konteks perbandingan antara lembaga legislatif Amerika Serikat dan Indonesia, penting untuk diakui bahwa meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam struktur, fungsi, dan sistem pemilihan, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mewakili suara rakyat, menghasilkan undang-undang yang berkualitas, dan mengawasi pemerintah. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keunikan dari masing-masing sistem politik dan pemerintahan, serta menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam merancang sistem pemerintahan yang efektif dan responsif. Dengan saling memahami

dan bertukar pengalaman, Amerika Serikat dan Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral mereka dan menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam menanggapi tantangan global dan regional di abad ke-21.

### Daftar Pustaka

- Ady Thea DA, "No TPSHK:UU IKN Bentuk Kesewenang-Wenangan Kuasa Legislasi Pemerintah-DPRitle," hukum online, 2023.
- Andriyan, Dody Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 79-94.
- Arifin, Muhammad Zainul, and Yunial Laily Mutiari. "Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2017): 1-15.
- Bakry, Kasman, Apriyanto Apriyanto, and Efraim Mangaluk. *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Dewandaru, R. Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-25.
- Erwiningsih, Winahyu. "Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Fathur, Arieffudin, Ifan Fayiz Al Farizqi, and Robby Abdul Kholik. "NEGARA DAN WARGA NEGARA." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 325-330.
- Junaedi Junaedi, and Agus Dimiyati. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01 (2020): 1-9.
- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. "Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat." *Sovereignty* 2, no. 4 (2023): 354-368.

- Nor Fadillah. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 243-264.
- Nurambiya, Muhammad Abdul Aziz, and Demson Tiopan. "Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5202-5214.
- Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, and Izdiyar Chairunnisa, "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80–88, <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.147>.
- Ola Anisa Ayutama, and Amanda Shifatul Jannah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/puux/2012 Terhadap Proses Pembentukan Undang-undang Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 3: 171-186.
- Partiah, Siti. "Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 148-164.
- Pirmansyah, Miki. "Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem bikameral di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014).
- Prima, Jaka. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019).
- Purnama, Nurlita, Aditya Ardiansyah, and Izdiyar Chairunnisa. "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80-88.
- Putra, LM Ricard Zeldi, Gamlan Dagani, Samsir Andi, and Ronal Pratama Putra. "Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12316-12325.
- R Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum*, 2020.

- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 2 (2017): 92-104.
- S H Diana Septaviana, S H Sukardi, and S H Rosa Ristawati, *TESIS (4697)-Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Partisipasi Masyarakat* (all.fh.unair.ac.id, 2024).
- S Sugiman, "Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen UUD Nkri 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020.
- Sapri, Sapri, Lauddin Marsuni, and Askari Razak. "Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1437-1451.
- Sari, Lusi Puspika, Aidil Zetra, and Tengku Rika Valentina. "Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Pasrtisipasi Politik Di Nagari Talang Anau." *Jurnal Niara* 13, no. 2 (2021): 11-22.
- Setiyono, Budi. *Pengantar Ilmu Politik*. Bumi Aksara, 2024.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23-35.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.
- Wahyu Eko Nugroho, "Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Gema Keadilan*, 2014, <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3732>.
- Wikipedia, "Undang-Undang (Indonesia)," n.d.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.
- Zuhro, R. Siti. "Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1-41.

